

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro ekonomi yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara/daerah dalam suatu periode tertentu. Indikator tersebut ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita atau kenaikan *output* yang disertai dengan perubahan struktur ekonomi serta perubahan struktur penggunaan tenaga kerja. Perubahan struktur ekonomi menunjukkan terjadinya perubahan komposisi atau susunan sektor ekonomi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kemudian perubahan ini diikuti pula oleh perubahan proporsi penggunaan tenaga kerja pada masing-masing sektor.

Djojohadikusumo (1994:6) mengemukakan bahwa, salah satu keberhasilan pembangunan ekonomi adalah peningkatan produksi, karena itu proses pembangunan menghendaki perubahan pada komposisi produksi dan perubahan pada pola pembangunan (alokasi) sumber produksi di antara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan dalam kerangka kelembagaan secara menyeluruh. Hal ini berarti perubahan adalah suatu transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktur ekonomi, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Arsyad (1999:6) mengemukakan bahwa pada umumnya pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan

pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara/daerah dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Definisi tersebut mempunyai pengertian:

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus
2. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita.
3. Kenaikan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang.
4. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang, misalnya bidang organisasi (institusi) dan perbaikan di bidang regulasi, baik secara formal maupun informal.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa pembangunan ekonomi sebagai suatu proses di mana saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis secara seksama. Dengan cara tersebut bisa diketahui runtutan peristiwa yang timbul yang akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kehidupan kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.

Pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan itu merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pada umumnya pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), sementara untuk daerah kabupaten dan kota diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun,

demikian cara tersebut mempunyai kelemahan karena cara itu tidak secara tepat menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang dicapai.

Pada masa lampau pembangunan ekonomi juga sering diukur berdasarkan struktur produksi dan penyerapan tenaga kerja (*employment*) yang diupayakan secara terencana (Todaro,2004:19). Biasanya dalam proses tersebut peranan sektor pertanian menurun untuk memberikan kesempatan bagi sektor manufaktur dan jasa-jasa yang senantiasa diupayakan agar terus berkembang, sehingga strategi pembangunan biasanya berfokus pada upaya untuk menciptakan industrialisasi secara cepat sehingga mengorbankan kepentingan pembangunan sektor pertanian.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa tolok ukur pembangunan yang bersifat ekonomi tersebut harus pula didukung oleh indikator-indikator sosial (*social indicators*) seperti tingkat melek huruf, tingkat pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, kecukupan kebutuhan perumahan dan sebagainya. Kaitannya dengan pemikiran tersebut, maka pada tahun 1990, *United Nation Development Program* (UNDP) memperkenalkan sebuah konsep pembangunan yang diberi nama *Human Development*. Konsep ini memprioritaskan pada pencapaian tujuan pembangunan yang menjadikan manusia sebagai fokus pembangunan (*Human Centered Development*). Pencapaian tujuan tersebut dapat diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*).

Muhammad (2004:2) mengemukakan bahwa orientasi dan titik sentral pembangunan yang hanya bertujuan mengejar pertumbuhan ekonomi tidak lagi dijadikan model pembangunan, meskipun pertumbuhan ekonomi mempunyai

peranan yang penting sebagai salah satu ukuran kemajuan suatu negara/daerah. Pertumbuhan ekonomi saja jauh dari mencukupi guna mengukur tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ia merupakan hasil dari berbagai kegiatan ekonomi: produksi, konsumsi, investasi, perdagangan dalam dan luar negeri, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa makin besar dan bervariasi kegiatan ekonomi pada suatu masyarakat, tentu hal itu baik karena ia akan menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja akan memberi penghasilan, dan dengan penghasilan itu seseorang beserta keluarganya memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan dasar: pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka Sen dalam Pressman (2000:274-275) menyatakan bahwa pembangunan sebagai pembebasan untuk memperoleh pilihan-pilihan yang luas dan berada dalam kerangka *human development*; jangan sampai manusia dikorbankan atas nama semua program yang memacu pertumbuhan. "Kebahagiaan manusia tidak bisa diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi". Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara/daerah seharusnya memfokuskan pada tujuan yang nyata, yaitu pengembangan potensi manusia, lagi pula kesuksesan perkembangan ekonomi seharusnya dimulai berdasarkan meningkatnya tingkat warga yang bebas buta huruf dan harapan hidup ketimbang pertumbuhan dalam produksi atau tingkat pendapatan.

Teori pembangunan yang dapat diuraikan di atas tidak sepenuhnya dapat menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pendekatan alternatif terhadap teori

pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

Mardiasmo (2004a:221) mengemukakan bahwa pembangunan daerah merupakan upaya terpadu yang menggabungkan beberapa dimensi kebijakan dari seluruh sektor yang ada. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera. Kemudian dijelaskan pula bahwa pembangunan yang tidak merata, seperti yang dilaksanakan selama ini, hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan tidak diimbangi dengan peningkatan kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan pendapatan per kapita penduduk daerah tersebut yang diwakili oleh PDRB. Pengukuran PDRB tersebut dapat menunjukkan kemampuan peningkatan *output* yang lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Tolok ukur yang demikian mengabaikan beberapa hal, seperti kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia, tentang pembangunan daerah menyebutkan bahwa di dalam memacu pertumbuhan kabupaten/kota, perlu ditekankan terhadap upaya peningkatan pelayanan publik, yang berupa:

1. Tata pemerintahan yang baik akan mendorong manajemen finansial dan penyediaan pelayanan yang bermutu tinggi.

2. Investor tertarik dengan kemajuan tersebut akan merangsang pengembangan ekonomi lokal sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang termasuk masyarakat miskin.
3. Pengembangan ekonomi lokal akan menguatkan keuangan daerah dan membantu mengentaskan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja.
4. Posisi fiskal yang lebih kuat akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membuat siklus pengembangan terus bergerak maju (World Bank, 2003).

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi dan pengaturan sumber daya yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan sistem pelayanan masyarakat. Karena sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Selatan selama 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Misalnya pada tahun 2016 perekonomian tumbuh 5,69%, kemudian naik menjadi 16,06% pada tahun 2017 dan pada tahun 2020 naik lagi menjadi 16,22%. Sementara dari sisi kinerja, fokusnya pada kesejahteraan sosial bidang pendidikan dilakukan terhadap indikator angka harapan lama sekolah, dan angka rata-rata lama sekolah.

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Halmahera Selatan mencapai 12,80 tahun yang berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang

untuk merasakan pendidikan minimal hingga Diploma II. Lamanya sekolah atau *years of schooling* merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah sebesar 7,15 tahun atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama kelas 1 dan meningkat menjadi 7,92 tahun pada tahun 2020.

Selanjutnya dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan pada tahun 2016 sampai tahun 2020 telah mampu mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Capaian indikator pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2020 rata-rata usia harapan hidup penduduk Halmahera Selatan 65,86 tahun masih di bawah Usia Harapan Hidup Provinsi maupun Nasional.
2. Di samping itu, angka kesakitan di Halmahera Selatan masih fluktuatif, walau kinerja semakin membaik.
3. Angka kematian ibu melahirkan masih cukup tinggi yakni 161 orang per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020, masih perlu terus diturunkan.
4. Kondisi balita gizi buruk tahun 2020 sebesar 0,2 persen, tetap harus dipertahankan kalau perlu diturunkan lagi.
5. Cakupan penggunaan air bersih tahun 2020 sebesar 53 %, pencapaian angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan angka Nasional 86%.
6. Cakupan penggunaan jamban keluarga di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar tahun 2019 sebesar 47,73 % masih dibawah target Nasional dan

mengalami peningkatan pada tahun 2020 68,34 %, karena masyarakat di pedesaan mulai menyadari bahwa buang air besar di sungai/pantai tidak baik dan akan memcemari lingkungan serta air serta sosialisasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus terus dilakukan.

Kemudian dari sisi ketenagakerjaan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja ditunjukkan oleh jumlah angkatan kerja, yaitu kelompok penduduk yang tersedia menawarkan jasa kerjanya pada tingkat upah dan kondisi perekonomian tertentu. Sedangkan permintaan tenaga kerja ditunjukkan oleh jumlah kesempatan kerja atau jumlah angkatan kerja yang bekerja pada periode tertentu. Deviasi antara kedua indikator tersebut menghasilkan angka pengangguran terbuka yang tidak lain adalah jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan.

Pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 109.663 orang, yang terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 95.60 orang dan penduduk yang tidak bekerja sebanyak 4.848 orang. Rasio penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja pada tahun 2019 adalah 95,42%.

Berdasarkan uraian di atas maka sejalan dengan tugas yang diemban oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah, maka meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu memberikan peningkatan kesempatan kerja dan indeks pembangunan manusia. Kondisi ini akan terwujud manakala kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat mendorong berkembangnya dunia usaha. Dengan berkembangnya perekonomian daerah, maka dampak positif juga dinikmati oleh

pemerintah daerah dalam bentuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam studi ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Halmahera Selatan.?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Selatan?
3. Apakah Kesempatan kerja berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini sebagai berikut :

1. Menganalisis dan menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Menganalisis dan menguji pengaruh kesempatan kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari studi ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat dipakai sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dan dikembangkan pada obyek yang sama, waktu yang berbeda maupun pada obyek yang berbeda, pada waktu yang berbeda pula. Selain itu dapat pula dipakai sebagai acuan pada obyek yang sama waktu yang berbeda, obyek yang berbeda waktu yang berbeda dengan model analisis yang berbeda pula.
2. Dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.